



Tak Miliki Izin Pemkot Yogya Segel Kios Jalan Perwakilan

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk melakukan penyegehan kios di sisi Utara Jalan Perwakilan, Kawasan Malioboro, Rabu (4/1).

Selain memasang pagar pembatas, di tempat itu juga dipasang tanda larangan melakukan aktivitas di atas tanah dan bangunan milik Kraton Yogyakarta tersebut. Karena para pedagang di situ tidak memiliki izin dari Kraton Yogyakarta.

"Selama ini kami sudah melaksanakan apa yang sudah disepakati. Karena sesuai dengan kesepakatan awal, seharusnya pada akhir tahun 2022 pedagang harus sudah pindah. Apalagi sejak Agustus 2022 Pemkot Yogya sudah menawarkan ke pedagang untuk pindah dari Jalan Perwakilan ke lantai atas Pasar Beringharjo dan Pakuncen. Namun sampai akhir tahun 2022 tidak

ada kata sepakat (titik temu). Karena para pedagang berharap bisa pindah ke Teras Malioboro 1. Padahal Teras Malioboro 1 saat ini sudah penuh, kalau mau pindah ke sana (Teras Malioboro 1) itu punya siapa," kata Penjabat (PJ) Walikota Yogya Sumardi ditemui di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (4/1).

Soal adanya klaim dari beberapa pedagang di Jalan Perwakilan yang menyatakan sudah membayar sewa, Sumardi mengungkapkan, soal pembayaran uang sewa tersebut pihaknya justru mempertanyakan pembayaran sewa itu diserahkan kepada siapa. Karena selama ini Kraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah tidak per-

nah menerima uang sewa dari para pedagang di Jalan Perwakilan. Begitu pula soal Serat Kekanginan, Kraton Yogyakarta tidak mengeluarkan izin berkaitan dengan itu.

"Pemkot Yogya sudah berkoordinasi dengan Pemda DIY berkaitan dengan langkah selanjutnya dalam penataan kawasan Jalan Perwakilan. Termasuk soal memberikan alternatif relokasi bagi pedagang," ungkapnya.

Penyegehan dilakukan oleh Tim Gabungan dari Pemkot Yogya, menyusul setelah Pemkot melayangkan Surat Edaran berisi pemberitahuan agar pedagang mengosongkan bangunan paling lambat Selasa (3/1). Setelah penyegehan, dilakukan pertemuan mendadak antara perwakilan pedagang dengan sejumlah pejabat dipimpin Sekda Kota Yogya Aman Yuradijaya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Pemkot..... Sambungan hal 1

Menurut Aman, Pemkot tetap berupaya untuk memberikan afimasi kepada pedagang yang terdampak penyegehan tersebut. "Kita akan bicarakan lagi bagaimana afimasi ini," tandasnya.

Perutupan aktivitas usaha di Jalan Perwakilan oleh Pemkot Yogya tersebut dilakukan karena mendapat tugas Pemda DIY untuk mengosongkan bangunan. Lokasi kios di Jalan Perwakilan menjadi bagian terdampak dari rencana pembangunan Jogja Planning Gallery selain Gedung DPRD DIY dan Teras Malioboro 2. Pembangunan gedung direncanakan dimulai pada 2024. Meskipun sudah bertemu dengan sejumlah pejabat usai penyegehan, namun pedagang di Jalan Perwakilan tetap

datang ke Balai Kota Yogya untuk bertemu PJ Walikota Yogya Sumardi. Namun sebetulnya di Baikot, mereka belum bisa bertemu dan akan dijadwalkan ulang.

Sementara Sekda DIY K Baskara Aji mengungkapkan, setelah Pemkot Yogya melakukan penyegehan bangunan di Jalan Perwakilan, Pemda DIY akan segera membongkar bangunan dan memindahkan kawasan Jalan Perwakilan.

Hai itu dilakukan berkaitan dengan persiapan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan tersebut. Tentunya dalam memindahkan kawasan Jalan Perwakilan, Pemda DIY akan meminta persetujuan Kraton Yogyakarta terlebih dahulu. Karena bangunan maupun

lahan di sisi Utara Jalan Perwakilan adalah milik Kraton Yogyakarta dan berstatus sebagai Sultan Ground (SG).

"Sejumlah persiapan terus dilakukan berkaitan dengan rencana pembangunan JPG di kawasan Malioboro. Dimana salah satunya adalah pembosanan lahan untuk relokasi pedagang kakilima (PKL) Teras Malioboro 2. Karena sesuai rencana yang sudah disepakati, JPG bakal dibangun di lahan itu. Kami mulai membebaskan sejumlah lahan di sisi utara Teras Malioboro 1. Dimana nantinya lokasi itu bakal digunakan PKL dari Teras Malioboro 2," jelas Baskara Aji seraya menambahkan, Gedung DPRD DIY akan dipindahkan ke Jalan Kenari, Yogya. (Ria/Dh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005